

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22  
TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 SUKODONO KABUPATEN SRAGEN)

**Oleh:**

Sutrisno

Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: [sutrisnotriatmojo@gmail.com](mailto:sutrisnotriatmojo@gmail.com)

**Abstract**

*The selection of new students at SMA Negeri 1 Sukodono went smoothly in accordance with the regulations, applying the zoning route, achievement and shifting the duties of parents/guardians. The purpose of this research is to know the implementation of Central Java Governor Regulation No. 22 of 2019. The research method is descriptive qualitative, interview and documentation. Determination of purposive sampling informants: principals, head of PPDB and guardians of students. Qualitative data analysis includes interview transcripts, data reduction, analysis, interpretation and triangulation. Research results 1) Resources are sufficient to support activities. 2) The disposition of the implementor is very good in terms of commitment and attitude. 3) Social media socialization communication has not been maximized. 4) The bureaucratic structure is quite good in the division of committee work. The implementation of the new student admissions policy at SMA Negeri 1 Sukdono has gone well: resources, disposition, communication and bureaucratic structure.*

**Keyword: Implementation; Regulation Of The Governor Of Central Java Number 22 Year 2019**

---

**Pendahuluan**

Dinamika kemajuan teknologi informatika dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi dengan

implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) atau online PPDB sistem Daring untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 memang bukan kali yang pertama, dua tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan berbagai dinamikanya, langkah ini dipilih bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. PPDB sistem Daring dirancang secara *real time* (basic waktu) memberikan banyak

kesempatan bagi masyarakat pengguna menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB sistem Daring masyarakat pengguna akan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB sistem Daring.

PPDB pada tahun pelajaran 2019/2020 untuk SMA Negeri diselenggarakan selain secara Daring, juga diselenggarakan dengan melalui 3 jalur yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Dalam jalur zonasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, zonasi adalah wilayah desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari musyawarah kerja Kepala sekolah (MKKS), jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitungkan berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa/kelurahan menuju ke satuan pendidikan dan calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak desa/kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 80% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jalur prestasi diprioritaskan untuk nilai kejuaraan Internasional Peringkat I, II, III dan Peringkat Nasional I dan nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan sebanyak 15% dari total jumlah keseluruhan

peserta didik yang diterima. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diprioritaskan untuk yang mengikuti kerja orang tua dan nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan sebanyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Sebagai sebuah kebijakan yang harus diperhatikan pertama kali adalah tahap formulasi, karena mempengaruhi tahap implementasinya, untuk kemudian mengevaluasinya. Jika tidak, maka besar kemungkinan pelaksanaan mengalami kendala yang dapat berasal dari ketidaksiapan pemerintah sebagai pelaksana peraturan dan masyarakat sebagai pihak terkena dampak kebijakan.

Pemerintah membuat peraturan bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan. Untuk itu kebijakan pemerintah untuk PPDB tahun pelajaran 2019/2019 ini menerapkan 3 jalur seleksi seperti yang dijelaskan diatas tadi. Seleksi di prioritaskan bagi peserta didik yang berada di dalam zonasi dengan sekolah terdekat. Ada kaitannya dengan penerapan jalur zonasi, yang dilansir di media masa Solo Pos tanggal, 5 April 2019 bahwa siswa berprestasi yang akan kalah bersaing karena penerapan jalur zonasi. Dari permasalahan tersebut SMA swasta favorit merespons positif kebijakan jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA yang memprioritaskan jarak rumah dan sekolah. Contohnya SMA Batik 2 Solo merespons baik peraturan

zonasi dalam PPDB SMA yang lebih memprioritaskan jarak rumah dan sekolah. Sejak diberlakukan jalur zonasi SMA dari tahun lalu, sekolah tersebut mengalami peningkatan jumlah peserta didik.

Dengan diberlakukan PPDB melalui seleksi 3 jalur, penulis ingin mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen Tahun 2019/2020) ?

## Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008: 713) pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2012: 14) mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuannya dari pendeskriptifan ini yaitu untuk

mendapat berbagai informasi mengenai suatu keadaan saat ini dan melihat variabel yang ada.

Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen sebagai organisasi.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Informan yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Jenis dan Sumber Data Penelitian Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dengan mendatangi langsung objek lokasi pengamatan cara ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Sumberdaya

##### 1) Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah

organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasian kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai serta tidak kompeten didalamnya. Namun staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai keterampilan dan kompeten dibidangnya masing-masing.

Panitia penerimaan peserta didik bari di SMA Negeri 1 Sukodono berjumlah 33 orang, dibagi atas bagian yaitu: penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi pendataan dan verifikasi, seksi pelayanan informasi, seksi pengendalian, seksi pengaduan dan sekretariat.

## 2) Sumber Non Manusia

Selain adanya sumber daya manusia dalam pengimplementasian Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, terdapat juga sumber daya non manusia yaitu: fasilitas (sarana prasarana) dan dana yang menjadi alat pendukung dalam proses pengimplementasian Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas. Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah ruang kelas dan segala item yang ada dalam ruang belajar mengajar, apabila ruang kelas tidak memenuhi atau mencukupi maka hal tersebut dapat menghambat proses kebijakan.

Sarana prasarana yang digunakan sudah memenuhi syarat atau sudah mencukupi. Penyediaan

komputer dan ruang belajar yang sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini anggaran yang dimaksud berupa dana, di mana dana ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena apabila dana yang diperlukan tidak cukup atau tidak memadai maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan berasal dari BOP dan BOS. Alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

## b. Disposisi / sikap pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka implementor akan melaksanakannya dengan senang hati namun apabila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para implementor terdapat dua elemen penting yaitu:

## 1) Kongnisi

Kognisi merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Kognisi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki kognisi yang baik. Petugas sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Panitia sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau calon peserta didik terkait penerimaan peserta didik baru bagi masyarakat yang kurang paham. Namun walaupun sudah dinilai cukup baik dalam

melaksanakan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seluruhnya dari implementasi kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru.

Kognisi pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sukodono memiliki kognisi yang baik.

#### 2) Sikap Pelaksana

Kecenderungan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana komitmen, komitmen akan mengarahkan pelaksana untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dan juga terwujudnya profesionalitas. Kemudian komitmen juga akan membuat pelaksana kebijakan selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen baik dari Dinas Pendidikan dan sekolah dalam mengimplementasikan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komitmen sangat dibutuhkan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan agar tujuan kebijakan atau program pun dapat tercapai.

Sikap pelaksana memiliki sikap, semangat dan profesionalisme yang baik. Petugas sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Disposisi *implementor* sudah sangat baik dapat dilihat

bagaimana komitmen dan sikap para *implementor* terhadap kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

#### c. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan suatu program. Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, serta kejelasan informasi tersebut (Agustino, 2016). Komunikasi kebijakan sangat perlu untuk disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi harus di transmisikan kepada target grup (kelompok sasaran) sehingga ada kejelasan mengenai kebijakan sistem.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Sukodono dapat kita lihat pada dimensi berikut:

##### 1) Transmisi

Dimensi transformasi menghen-daki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terlibat. Terkait dengan penyampaian informasi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi

yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sukodono yaitu dengan penyampaian informasi yang jelas melalui media sosial berupa *web site* resmi sekolah yaitu: <https://sma1sukodono.sch.id/> dan juga disampaikan dengan cara memasang spanduk-spanduk sehingga masyarakat dapat mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan untuk masuk di SMA Negeri 1 Sukodono.

Penyampaian informasi sudah cukup baik, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PPDB terbaru. Sosialisasi tentang kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah kepada kelompok sasaran atau masyarakat melalui media sosial dan memasang spanduk-spanduk.

#### 2) Kejelasan informasi

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak membingungkan pelaksana program, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Berdasarkan informasi kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sudah jelas bahwa tujuan penerimaan peserta didik baru diterapkannya adalah untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan bagi murid, memperdekat lingkungan sekolah pada lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas juga diskriminasi di sekolah, terkhususnya sekolah negeri, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan.

Kejelasan informasi pelaksana dengan kelompok sasaran sudah sudah berjalan dengan baik untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan

adanya kebijakan ini maka dapat menyebar atau merata keseluruhan sekolah hingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa. Namun masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

#### d. Struktur Birokrasi SOP

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang memola jalannya kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil di format oleh aturan organisasi. Sebagai sebuah instansi sekolah yang telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi dan salah satu ciri yang diadopsi yaitu: pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi di format ke dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur memiliki tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanya pemetaan tugas pokok dan fungsi merupakan cerminan dari diadopsinya sistem pembagian kerja.

SMA Negeri 1 Sukodono membuat tim khusus dalam penerimaan peserta didik baru dimana tim kepanitiaan pertama membenahi segala urusan tentang PPDB mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hingga pada tahap pendaftaran ulang calon siswa baru. Dalam hal ini juga

dibentuknya tim khusus pengaduan masyarakat terkait dengan proses PPDB. Masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru. Tim pelaksana yang bertanggung jawab adalah pihak wakasek bidang kesiswaan, di mana masing pelaksana sudah mempunyai tugas. Masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi, dan setiap jenjang melekat peran atau wewenang yang harus dijalankan sesuai tugas yang diberikan atau dilimpahkan. Adapun struktur organisasi yang ada dalam SMA Negeri 1 Sukodono terdiri atas Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarpras, Staf Kurikulum dan Guru.

Struktur yang mengatur akan jalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini di kendalikan oleh wakasek bidang kesiswaan yang mengatur dan menjalankan segala urusan terkait pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru ini, mulai pengumuman persyaratan, pendaftaran, hingga tahap pendaftaran ulang siswa baru. Bidang ini bertugas dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Bertugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru dan sebagai penyesuaian pelaksanaan dengan aturan yang berlaku agar tidak ada pelaksanaan yang dilakukan di luar aturan yang telah ditentukan.

## **2. Pembahasan**

### **a. Sumberdaya**

#### **1) Sumberdaya manusia**

Menurut Meter dan Horn (1975), keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang terjadi persoalan sulit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik tersebut, demikian halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Flippo (dalam Hani Handoko, 1999:5) manajemen sumber daya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, memelihara dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan

organisasi dan masyarakat. Kemudian menurut Hani Handoko (1999:5) manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi. Manajemen sumberdaya menurut Henry Simmamora (1999:33) adalah pendayagunaan, pengembangan penilaian, pemberian baIas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekelja. Manajemen sumber daya yang efektif mengharuskan manajemen menemukan cam terbaik daIam mengkaryakan orang-orang agar mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan kineJja organisasi. Lebih lanjut dijelaskan ada 4 (empat) tipe sumber daya yaitu : (1) finansal, (2) fisik, (3) manusia, (4) kemampuan tehnologi dan system. Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-swnber yang dibutuhkan tidak coop memadai. Swnber sumber yang dimaksud menurut George C Edwards III (1980:30) adalah: (a) staf yang relative coop jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, (b) infonnasi ya.'lg memadai atau relevan untuk keperluan implementasi dan (d) adanya wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan, (e) fasilitas-fasilitas lainnya.

Sumberdaya manusia atau personel pelaksana kebijakan sudah mencukupi. Personel pelaksana sudah mencukupi. Personel dari sumberdaya manusia sudah cukup

yaitu: sebanyak 33 orang panitia PPDB.

## 2) Sumber dana

Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Agustino (2008:142), Apabila suatu kebijakan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel tetapi tidak diimbangi dengan dana yang tersedia, maka akan sulit mencapai tujuan suatu kebijakan.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat (Sugiyono, 2015: 49).

Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan berasal dari berasal dari BOP dan BOS. Anggaran/dana sudah cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sukodono karena alokasi dana yang



sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

### 3) Sarana dan prasarana

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie, 2005:8).

Menurut E. Mulyasa (2004:49) sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Sementara itu, menurut Bafadal (2003:3), prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Land dan Hannafin (2000:3) mengatakan bahwa untuk pembelajaran di masa depan, lingkungan belajar sebaiknya dibangun di atas lima fondasi inti yaitu: psikologis, pedagogis, teknologis, kultur, dan pragmatis.

Untuk mendorong pembelajaran, lingkungan belajar sebaiknya memperhatikan perbedaan gaya berpikir dan belajar pembelajar (*psikologis*) dengan cara bagaimana pelajaran disampaikan dan kegiatan dirancang untuk menstimuli pembelajar (*pedagogis*). Pilihan terhadap kandungan pelajaran yang ingin disampaikan dan bagaimana hal itu disampaikan dapat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (*teknologis*). Pada gilirannya, pilihan metode dan materi pelajaran dipengaruhi oleh nilai-nilai utama yang dianut oleh komunitas pembelajar dan, akhirnya, fondasi pragmatis menekankan rekonsiliasi sumber daya yang tersedia dan hambatan dengan disain actual lingkungan belajar tertentu.

Sarana prasarana dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan sudah memenuhi syarat atau sudah mencukupi yaitu prasarana dan teknologi yang ada saat ini sudah memadai dan mencukupi. Sarana dan prasarana sudah mencukupi demikian juga dengan teknologi juga sudah memadai. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah memenuhi standar.

#### b. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses

implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan (Sugiyono, 2015: 49).

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik dalam perspektif adalah sikap (*disposition*) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (*agen*) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implemementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persolan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Kognisi panitian penerimaan peserta didik baru sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau calon peserta didik terkait penerimaan peserta didik baru bagi masyarakat yang kurang paham. Namun walaupun sudah dinilai cukup baik dalam melaksanakan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seluruhnya dari implementasi kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru.

Sikap Pelaksana menunjukkan bahwa disposisi *implementor* dalam pelaksanaan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sudah

sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para *implementor* terhadap kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru. Sikap para pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sukodono sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

Disposisi/ sikap, semangat, profesionalisme dalam pelaksanaan kebijakan memiliki sikap, semangat dan profesionalisme yang baik. Petugas sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan yaitu disposisi/ sikap, semangat, profesionalisme pelaksanaan kebijakan sudah baik sesuai dengan kompetensi petugas. Pelaksana kebijakan mempunyai sikap, semangat dan profesionalime yang baik. Sikap baik, semangat tinggi dan professional dari petugas.

#### c. Komunikasi

Komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III dalam Agustino (Agustino, 2016:137) komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi suatu kebijakan dapat tidak berjalan baik dikarenakan tidak adanya konsistensi dalam komunikasi dalam suatu kebijakan (Winarno, 2014:176). Selanjutnya Edward III (Agustino, 2016:137) menjelaskan bahwa ada tiga indikator penting dalam

komunikasi suatu kebijakan yaitu, transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Edwin B Flippo dalam Mangkunegara (2011: 145) komunikasi adalah aktivitas yang menyebabkan orang lain menginterpretasikan suatu ide, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Hovland, Janis dan Kelley dalam Muhammad (2009: 4) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Sedangkan menurut Robbins and Judge (2008: 5) komunikasi adalah transfer dan pemahaman makna. Bovee and Thil dalam Pratminingsih (2006: 2) kata komunikasi berasal dari bahasa latin *communicare* yang berarti memberi, mengambil bagian atau meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum (*common*), sama atau saling memahami.

Salah satu bentuk komunikasi dalam suatu kebijakan adalah sosialisasi. Agustino (Agustino, 2016:161-162) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Maka dari itu efektif tidaknya suatu kebijakan maka didasari juga dengan dilaksanakan atau tidaknya proses sosialisasi tersebut.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum dan sudah berjalan dengan baik. Komunikasi sudah disampaikan kepada seluruh warga masyarakat dan calon peserta didik SMA. Dikomunikasikan dengan warga masyarakat dan peserta didik

SMA. Namun masih ada masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Sosialisasi tentang kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah kepada kelompok sasaran atau masyarakat melalui media sosial dan memasang spanduk-spanduk. Kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru dirumuskan untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya kebijakan ini maka dapat menyebar atau merata keseluruh sekolah hingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa.

#### d. Struktur Birokrasi SOP

SOP (*Standard Operating Procedure*) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013: 86).

Sedangkan Santosa (2014:8) menjelaskan mengenai suatu langkah-langkah khusus yang spesifik yang digunakan untuk menjelaskan dari suatu aktifitas secara terperinci untuk menyempurnakan suatu Pekerjaan sesuai dengan regulasi, perusahaan, kesehatan, pendidikan, penerbangan, perindustrian bahkan menjalankan usaha kecil. Secara luas, SOP merupakan dokumen yang menjelaskan aktivitas operasional yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-

hari, dengan tujuan agar tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten.

SOP yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan menggunakan SOP Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas.

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan atau bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Roskin (2009) yang mengatakan birokrasi dalam pemerintahan modern terdapat empat fungsi yang salah satunya adalah administrasi yang dimaksudkan bahwa fungsi birokrasi yakni untuk mengimplementasikan undang-undang (Michael G. Roskin, et al, 2000).

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), inimenjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi. Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2005 : 8).

Struktur birokrasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu pembentukan tim seleksi PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu pembentukan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Pembentukan tim atau Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Adanya panitia Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB).

Di SMA Negeri 1 Sukodono struktur yang mengatur akan jalanya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini dibawah atau di kendalikan oleh wakasek bidang kesiswaan. Bidang tersebut yang akan mengatur dan menjalankan segala urusan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru ini, mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran, hingga tahap pendaftaran ulang siswa baru. Bidang ini memiliki tugas dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Wakasek bidang kesiswaan bertugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru dan sebagai penyesuaian pelaksanaan dengan aturan yang berlaku agar tidak ada pelaksanaan yang dilakukan di luar aturan yang telah ditentukan.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia sudah sangat cukup menunjang kegiatan penerapan kebijakan

tersebut, dilihat dari pembentukan tim panitia PPDB dan fasilitas \sudah memadai: mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar dan ketiga dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan sekolah. 2) Disposisi *implementor* sudah sangat baik dilihat bagaimana komitmen dan sikap *implementor* terhadap kebijakan. Sikap pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru sudah sangat profesional dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru. 3) Komunikasi berupa sosialisasi kebijakan dilakukan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran melalui media sosial, namun sosialisasi belum sepenuhnya maksimal. Terbukti masih ada orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. 4) Struktur birokrasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja kepanitian PPDB sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan: 1) Perlu dilakukan sosialisasi langsung dengan melibatkan elemen masyarakat dan dilakukan secara merata agar penyampaian informasi sesuai dengan harapan. 2) Perlu memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan lebih meningkatkan pemahaman agar menghindari permasalahan dalam PPDB. 3) Bagi SMA Negeri 1 Sukodono baik kepala sekolah dan seluruh jajarannya agar mempertahankan dan

mengoptimalkan kebijakan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan merata pada seluruh siswa baik siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi, sedang dan rendah.

### Daftar Pustaka

- A.G Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bafadal, Ibrahim. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Rodya Karya.
- Edwards III, George C. and I. Sharkansky. (1978). *The Policy Predicament*. San Francisco: Freeman and Co.
- Given, Lisa M. (editor). (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Thousand Oaks: Sage.

- Handoko, T, Hani. (1999). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hannafin, M., Land, S., & Oliver, K. (1999). Open learning environments: Foundations, methods, and models. *Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory*, 2, 115-140.
- Simamora, Henry. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ke-2, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Kodoatie, Robert J. (2005). *Pengantar manajemen infrastruktur / Robert J. Kodoatie*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meter, Van and Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society.
- Michael G. Roskin, et al. (2000). *Political Science An Introduction*. Prentice Hall New Jersey.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratminingsih, Astuti, S. (2006). *Komunikasi Bisnis (Edisi pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins SP, dan Judge. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 2*, Jakarta : Salemba Empat
- Santosa, J. (2014). *Lebih Memahami SOP*. Surabaya: Kata Pena.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi. 2016. *Tingkat Resistensi Calon Kepala Daerah Non Muslim Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2015*. Surakarta: Eksplorasi Vol.28 No.2
- Tambunan, R.M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.
- Winarno. (2014). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo.